

DAFTAR PUSTAKA

- Ambat, A. (2022). Analisis Value For Money Pada Kinerja Program Kegiatan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*. 6(1): hal 689-698.
- Ambya. (2023). *Ekonomi Keuangan Daerah*. Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. (2025). *Provinsi Riau Dalam Angka 2024*. Pekanbaru: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. Badan Pusat Statistik Provinsi Riau.
- Bam. (2023). Lima Permasalahan di Pekanbaru yang Perlu Perhatian Khusus.
- Bastian. I. (2021). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Edisi Ketiga. Jakarta. Erlangga.
- Dinanty, DN et al. (2023). Analisis Realisasi Anggaran Belanja Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan Value For Money Dan Rasio Keuangan Di Kantor Kecamatan Gedeg Periode 2017-2021. *GEMILANG: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*. 3(4): 173–83. doi:10.56910/gemilang.v 3i4.874.
- Diva, V. (2024). Analisis Value For Money Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintahan Kota Depok Tahun Anggaran 2021-2023. *Jurnal Anggaran : Jurnal Publikasi Ekonomi dan Akuntansi*. 2(2): Hal 79-90. DOI:.
- Dwiyanto. (2020). *Teori Administrasi Publik dan Penerapan Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Erawan. 2023. Peranan Value For Money Untuk Mengukur Kinerja Pemerintahan Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*. 8(3): hal 187-193.
- Harindra, I.,&Sapari, S. (2019). Analisis Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah Daerah dalam Perspektif Value for Money. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(2). Hal 1-15.
- Hatta, Z.,Arif,E., & Garini, N. T. (2021). Analisis Value For Money Pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan

Provinsi Riau. *Economics, Accounting and Business Journal*, 1(1), 198– 211.

Kemenkeu. (2025). Data APBD. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2006). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59*.

Mangkunegara, AP. (2022). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Mahmudi. (2021). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP. YKPN.

Maharani, R., & Trisnawati, E. (2025). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendekatan Value for Money pada Pemerintah Kota Medan. *Jurnal Akuntansi dan Pembangunan Daerah*, 10(1), 66–79.

Mahsun, M. (2018). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.

Maolo, CS. (2024). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Kabupaten Maluku Tengah). 01(01): Hal 9-19.

Mardiasmo. (2022). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.

Nolasari, AB et al. (2023). Analisis Iklim Mikro Kawasan Berdasarkan Kerapatan Bangunan dan Vegetasi di Kawasan Institut Teknologi Bandung (ITB) Kampus Ganesha Bagian Selatan. *REKSABUMI*, 2(2), 75–86.

Nurafifah, PI. et al. (2022). Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Menggunakan Pendekatan Value for Money (Studi Kasus Pada Kabupaten Nabire Tahun 2019-2021). *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 2(2), 56–71.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 105 Tahun 2000 membahas tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Purwadinata, S. (2020). Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Menggunakan Prinsip Value For Money (Studi APBD Kabupaten Sumbawa). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. 8(2): 78-87.

- Rizky, A., & Mahendra, T. (2024). Analisis Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Daerah Berbasis Value for Money pada BKAD Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik*, 8(1), 25–36.
- Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2008). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Silalahi, D., Nasution, E., & Rahman, A. (2025). Analisis Penerapan Konsep Value for Money pada BPKAD Kabupaten Lamongan. *Jurnal Keuangan Daerah dan Akuntabilitas Publik*, 11(1), 58–72.
- Suridiyanti, R., Yusuf, M., & Arifin, H. (2024). Analisis Penerapan Konsep Value for Money dalam Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka. *Jurnal Akuntansi Publik dan Keuangan Daerah*, 8(1), 15–27.
- Sanger, GW. (2023). Evaluasi Kinerja Keuangan Dengan Metode Value For Money Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*. 6(2): Hal 1193-1202.
- Sariono, E. (2024). Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Depok. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*. 7(5): 3580-3587.
- Sudaryono. (2022). *Komunikasi Bisnis*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.
- Tumbel, M., Rorong, J., & Siwu, J. (2024). Analisis Penerapan Value for Money pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 12(3), 87–98.